

English-Mediated Digital Communication dalam Administrasi Publik: Peluang Efisiensi dan Tantangan Inklusivitas

Restika Dewiana

Restika14@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL Sungailiat)

Juriana

Juriana599@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstract

English-Mediated Digital Communication (EMDC)—the use of English across digital channels, documentation, technical standards, APIs, and cross-border interactions in public administration—has become increasingly critical amid the digitalization and globalization of government. This literature review examines EMDC's impact on public administration efficiency, focusing on interoperability, knowledge transfer, innovation adoption, international collaboration, and citizen outreach. Findings indicate that EMDC enhances system integration, accelerates digital service delivery, and facilitates access to global best practices when public officials possess sufficient English proficiency and digital literacy. However, it also poses challenges, including potential stakeholder exclusion, reliance on English-based platforms, and inequalities in multilingual or developing contexts. The review underscores the need for balanced strategies—such as multilingual policies, digital literacy training, and inclusive implementation—to maximize EMDC benefits while minimizing risks.

Keywords: *English-Mediated Digital Communication, Public Administration, Efficiency, Digital Literacy, Inclusion, E-Government.*

Abstrak

English-Mediated Digital Communication (EMDC)—penggunaan bahasa Inggris dalam saluran digital, dokumentasi, standar teknis, API, dan interaksi lintas negara dalam administrasi publik—menjadi semakin penting di era digitalisasi dan globalisasi pemerintahan. Kajian literatur ini menelaah pengaruh EMDC terhadap efisiensi administrasi publik, dengan fokus pada

interoperabilitas, transfer pengetahuan, adopsi inovasi, kolaborasi internasional, dan jangkauan layanan kepada warga. Temuan menunjukkan bahwa EMDC meningkatkan integrasi sistem, percepatan layanan digital, dan akses terhadap praktik terbaik global apabila aparatur publik memiliki kemampuan bahasa Inggris dan literasi digital yang memadai. Namun, EMDC juga menghadirkan tantangan, seperti risiko eksklusi bagi pemangku kepentingan dengan kemampuan bahasa terbatas, ketergantungan pada platform berbahasa Inggris, dan kesenjangan dalam konteks multibahasa atau negara berkembang. Kajian ini menekankan pentingnya strategi seimbang, termasuk kebijakan multibahasa, pelatihan literasi digital, dan implementasi inklusif, untuk memaksimalkan manfaat EMDC sekaligus meminimalkan risiko.

Kata Kunci : *English-Mediated Digital Communication*, administrasi publik, efisiensi, literasi digital, inklusi, e-government.

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam administrasi publik di Indonesia telah menghadirkan tuntutan baru terkait interoperabilitas, penyampaian layanan yang cepat, transparansi informasi, dan koordinasi antar-lembaga. Dalam lanskap yang dinamis ini, bahasa Inggris sering muncul sebagai *lingua franca* praktis dalam artefak digital—seperti dokumentasi teknis, *platform vendor*, komunitas *open-source*, standar internasional, dan arsitektur layanan publik lintas-batas. Fenomena Komunikasi Digital yang Dimediasi Bahasa Inggris (*English-Mediated Digital Communication/EMDC*), di mana bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa operasional artefak digital dalam administrasi publik, perlu dikaji secara cermat terkait dampaknya terhadap efisiensi administrasi. Di sini, efisiensi dipahami secara luas sebagai pengurangan waktu transaksi, penurunan beban administratif, peningkatan pemanfaatan layanan publik, percepatan implementasi sistem, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga.¹

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi suatu keniscayaan di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah di berbagai negara kini menghadapi tuntutan yang semakin kompleks, termasuk integrasi sistem antar lembaga

¹See Janowski, Tomasz. "Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization." *Government Information Quarterly* 32, no. 3 (2015): 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>

(interoperabilitas), penyediaan layanan publik yang cepat dan responsif, transparansi data dan informasi bagi warga, serta koordinasi antarlembaga yang semakin intensif. Evolusi menuju pemerintahan digital, atau *e-government*, menempatkan teknologi bukan sekadar sebagai alat bantu, tetapi sebagai pemicu perubahan struktural dan budaya dalam birokrasi.²

Salah satu dimensi penting dari perkembangan ini adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai *lingua franca* dalam artefak digital administrasi publik, seperti dokumentasi teknis, antarmuka pemrograman aplikasi (API), standar internasional, platform vendor, dan komunitas open-source. Fenomena ini dikenal sebagai *English-Mediated Digital Communication (EMDC)*, yaitu kondisi di mana bahasa Inggris menjadi bahasa operasional artefak digital dalam konteks administrasi publik lintas batas atau yang bersifat global. Kajian mengenai EMDC menjadi penting, khususnya untuk memahami dampaknya terhadap efisiensi administrasi publik, termasuk pengurangan waktu transaksi, penurunan beban administratif, percepatan adopsi sistem, peningkatan jangkauan layanan, dan pemanfaatan sumber daya antar-lembaga secara optimal.³ Kesenjangan kemampuan digital dan bahasa ini dapat menjadi penghambat signifikan bagi keberhasilan digitalisasi.

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh arus informasi lintas batas dan integrasi teknologi secara masif, bahasa Inggris telah bertransformasi menjadi *lingua franca* yang dominan dalam berbagai artefak digital administrasi publik. Hampir seluruh elemen yang membentuk ekosistem digital pemerintahan—mulai dari dokumentasi teknis, *Application Programming Interface* (API), hingga standar internasional dan perangkat lunak yang dikembangkan oleh vendor global—mengandalkan bahasa Inggris sebagai medium utama komunikasi dan operasional.⁴ Dominasi bahasa Inggris ini tidak terbatas pada ranah komunikasi teknis semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penting untuk mendorong kolaborasi lintas negara, memperluas akses terhadap literatur ilmiah dan kebijakan global, serta memfasilitasi proses adopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi internasional.⁵ Dengan demikian, penguasaan bahasa Inggris bukan lagi sekadar

² Janowski, Tomasz. "Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization." *Government Information Quarterly* 32, no. 3 (2015): 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>

³ Seidlhofer, Barbara. "English as a Lingua Franca." *ELT Journal* 59, no. 4 (2005): 339–341

⁴ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishing, 2010).

⁵ David Crystal, *English as a Global Language*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

keterampilan tambahan, melainkan telah menjadi komponen integral dari kapasitas administratif modern.⁶

Dalam konteks ini, bahasa Inggris menjadi medium yang menjembatani proses komunikasi antarpemangku kepentingan melalui sistem digital, baik berupa dokumentasi teknis, antarmuka pengguna, maupun jaringan kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan di tingkat nasional dan internasional.⁷ EMDC tidak hanya mencerminkan dominasi bahasa Inggris dalam ruang digital, tetapi juga memperlihatkan bagaimana infrastruktur pemerintahan modern kini sangat bergantung pada kompetensi linguistik global untuk memastikan kelancaran interoperabilitas dan efektivitas kolaborasi lintas batas.

Lebih jauh lagi, keberadaan EMDC menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik tidak semata-mata merupakan perubahan bersifat teknologis, melainkan juga transformasi linguistik dan kultural yang mendalam.⁸ Bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris, berfungsi sebagai mediator utama dalam proses pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, serta pengambilan keputusan yang bersifat transnasional.⁹ Oleh karena itu, kemampuan institusi publik dalam memahami dan memanfaatkan EMDC menjadi salah satu indikator penting dari kesiapan mereka menghadapi era pemerintahan digital yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global.¹⁰

Pentingnya menelaah dampak *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) terhadap efisiensi administrasi publik tidak dapat diabaikan dalam konteks pemerintahan modern yang semakin terdigitalisasi.¹¹ Efisiensi dalam administrasi publik dapat dipahami secara luas, tidak hanya sebatas penghematan waktu atau sumber daya, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti percepatan proses transaksi, penyederhanaan alur birokrasi, penurunan beban administratif, serta peningkatan kemampuan institusi dalam mengadopsi

⁶Jan Blommaert, *The Sociolinguistics of Globalization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

⁷ Tony McEnery and Andrew Hardie, *Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

⁸ Deborah Cameron, *Working with Spoken Discourse* (London: Sage Publications, 2001).

⁹ Ines Mergel, *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

¹⁰ Andrew Chadwick, *The Hybrid Media System: Politics and Power* (Oxford: Oxford University Press, 2017).

¹¹ Ines Mergel, *Digital Transformation in the Public Sector: Governance, Innovation, and Public Value Creation* (Cham: Springer, 2019).

sistem baru secara efektif.¹² Dalam kerangka ini, EMDC memainkan peran strategis sebagai katalis yang mempercepat interaksi lintas lembaga dan lintas negara, karena penggunaan bahasa Inggris memungkinkan pertukaran data, pemanfaatan perangkat lunak internasional, serta integrasi layanan publik berbasis digital berlangsung dengan lebih efisien dan tanpa hambatan linguistik yang signifikan.¹³

Pegawai atau pejabat publik yang memiliki kemampuan memadai dalam memahami dan menggunakan bahasa Inggris pada konteks digital umumnya menunjukkan tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap teknologi baru, serta lebih mampu menyelesaikan proses administrasi dengan cepat dan akurat.¹⁴ Hal ini juga berimplikasi pada peningkatan efektivitas koordinasi antar-lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena kemampuan berkomunikasi melalui sistem digital berbahasa Inggris memperkecil risiko miskomunikasi, memperlancar transfer pengetahuan, dan mempercepat adopsi kebijakan berbasis praktik global.¹⁵ Dengan demikian, penguasaan EMDC dapat dipandang sebagai salah satu indikator penting dari kapasitas digital aparatur negara dan sebagai faktor penentu dalam keberhasilan implementasi transformasi digital di sektor publik.¹⁶

Meskipun penggunaan bahasa Inggris dalam artefak digital pemerintahan membawa berbagai keuntungan dari segi efisiensi dan interoperabilitas, fenomena ini juga menghadirkan sejumlah risiko yang patut diperhatikan.¹⁷ Salah satu risiko utama adalah munculnya kesenjangan linguistik antara aparatur dan warga negara yang memiliki tingkat kemahiran bahasa Inggris berbeda-beda. Dalam konteks digital governance, ketidakmampuan memahami antarmuka, instruksi, atau dokumentasi yang berbahasa Inggris dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan publik, kesalahan administratif, atau bahkan eksklusi digital bagi kelompok masyarakat tertentu.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang dimediasi oleh bahasa tidak selalu inklusif;

¹² Christopher Pollitt and Geert Bouckaert, *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017).

¹³ Miriam Lips, *Digital Government: Managing Public Sector Reform in the Digital Era* (London: Routledge, 2020).

¹⁴ Helen Margretts, *Information Technology in Government: Britain and America* (London: Routledge, 1999).

¹⁵ Yu-Che Chen, *Managing Digital Governance: Design, Strategy, and Practice* (New York: Routledge, 2017).

¹⁶ OECD, *Digital Government Review: Building a Digital-Ready Civil Service* (Paris: OECD Publishing, 2020).

¹⁷ Ines Mergel, *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

¹⁸ Yu-Che Chen and Micah Altman, "Digital Democracy and Public Governance: Governance Innovation and the Challenge of Inclusion," *Government Information Quarterly* 38, no. 3 (2021): 101568.

justru dapat memperlebar jarak antara kelompok yang memiliki literasi bahasa dan teknologi tinggi dengan mereka yang tidak.¹⁹ Akibatnya, bahasa Inggris tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi teknis, tetapi juga menjadi penentu akses terhadap sumber daya administratif dan partisipasi dalam ekosistem digital pemerintahan.²⁰

Selain persoalan akses linguistik, dominasi bahasa Inggris dalam platform, standar, dan vendor teknologi internasional juga dapat menimbulkan ketergantungan struktural terhadap infrastruktur digital asing.²¹ Ketergantungan ini berpotensi membatasi kemandirian nasional dalam mengelola sistem administrasi publik, terutama ketika perangkat lunak, protokol keamanan, dan standar interoperabilitas dikendalikan oleh entitas global yang tidak sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal.²² Beberapa penelitian menyoroti bahwa orientasi berlebihan terhadap solusi teknologi berbahasa Inggris dapat menghambat adaptasi lokal, memperlemah keamanan data nasional, serta menciptakan asimetri kekuasaan antara negara pengguna dan penyedia teknologi.²³ Oleh karena itu, tantangan utama bagi pemerintah masa kini adalah menemukan keseimbangan antara manfaat integrasi global melalui EMDC dan pentingnya menjaga inklusi sosial serta kedaulatan digital dalam penyelenggaraan layanan publik.²⁴

Fenomena *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) menjadi semakin kompleks ketika diterapkan di negara-negara berkembang dan dalam lingkungan masyarakat multibahasa.²⁵ Kompleksitas ini muncul karena tingkat kemahiran bahasa Inggris, kemampuan literasi digital, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak merata memengaruhi sejauh mana digitalisasi dapat berjalan

¹⁹ Mark Warschauer and Rebecca Black, "Digital Language Divides: Access and Inequality in Global Communication," *Language Learning & Technology* 24, no. 2 (2020): 6–23.

²⁰ Tanja Aitamurto and Hélène Landemore, "Crowdsourced Deliberation: The Case of the Law on Off-Road Traffic in Finland," *Policy & Internet* 7, no. 2 (2015): 174–196.

²¹ Karen Yeung, Andrew Howes, and Ganna Pogrebna, "State Responsibility for Algorithmic Bias: The Case of Government Procurement of AI Systems," *Computer Law & Security Review* 40 (2021): 105522.

²² OECD, *Digital Government Review of Latin America: Building Inclusive and Trustworthy Public Services* (Paris: OECD Publishing, 2022).

²³ Rikke Frank Jørgensen, "Human Rights in the Age of Platforms," *Information, Communication & Society* 24, no. 1 (2021): 1–17.

²⁴ Martin Lodge and Kai Wegrich, *The Problem-Solving Capacity of the Modern State: Governance Challenges and Administrative Capacities* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

²⁵ Ines Mergel, *Digital Transformation in the Public Sector: Governance, Innovation, and Public Value Creation* (Cham: Springer, 2019).

efektif.²⁶ Di banyak negara berkembang, perbedaan kemampuan linguistik dan keterbatasan akses terhadap sumber daya digital dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam sistem administrasi digital dan mereka yang terpinggirkan darinya.²⁷ Dengan demikian, keberhasilan implementasi EMDC tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial, pendidikan, dan kebijakan bahasa yang mendukung keterlibatan semua lapisan masyarakat.²⁸

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara efisiensi global yang dihasilkan oleh penggunaan bahasa Inggris sebagai *lingua franca* digital dan prinsip keadilan sosial yang menjamin akses setara bagi seluruh warga negara.²⁹ Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana mengoptimalkan EMDC agar tetap inklusif, adaptif terhadap keragaman bahasa lokal, dan relevan dengan kebutuhan nasional.³⁰ Untuk itu, kajian mendalam terhadap konteks multibahasa, tantangan lokal, serta praktik terbaik internasional menjadi krusial dalam merancang kebijakan digitalisasi yang efektif dan berkelanjutan.³¹ Pendekatan semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan digital, tetapi juga memastikan bahwa inovasi teknologi berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial, bukan sebagai sumber eksklusi baru dalam tatanan administrasi publik modern.³²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya untuk menelaah secara mendalam peran *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) dalam mendorong peningkatan efisiensi administrasi publik di era transformasi digital. Kajian ini menyoroti berbagai mekanisme yang relevan, seperti peningkatan interoperabilitas antar-sistem pemerintahan, percepatan transfer pengetahuan lintas lembaga dan negara,

²⁶ Sirkku Kotilainen and Janne Matikainen, "Participation, Literacy, and Citizenship: Digital Inclusion and Youth Empowerment in Developing Contexts," *Telematics and Informatics* 54 (2020): 101432.

²⁷ Mark Warschauer and Rebecca Black, "Digital Language Divides: Access and Inequality in Global Communication," *Language Learning & Technology* 24, no. 2 (2020): 6–23.

²⁸ Yu-Che Chen, *Managing Digital Governance: Design, Strategy, and Practice* (New York: Routledge, 2017).

²⁹ OECD, *Digital Government Review of Latin America: Building Inclusive and Trustworthy Public Services* (Paris: OECD Publishing, 2022).

³⁰ Shannon Vallor, *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting* (Oxford: Oxford University Press, 2016).

³¹ UNDP, *Inclusive Digital Transformation: Achieving Sustainable Development in the Digital Age* (New York: United Nations Development Programme, 2021).

³² Rikke Frank Jørgensen, "Human Rights in the Age of Platforms," *Information, Communication & Society* 24, no. 1 (2021): 1–17.

penguatan kolaborasi internasional, serta perluasan jangkauan layanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Dengan memahami dimensi-dimensi tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana EMDC berkontribusi terhadap penciptaan birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan berdaya saing global.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat dalam implementasi EMDC di lingkungan administrasi publik. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting agar kebijakan dan praktik tata kelola pemerintahan dapat dirancang secara lebih efektif dan kontekstual, terutama dalam situasi multibahasa serta ekosistem digital yang kian kompleks. Tujuan akhirnya adalah merumuskan suatu kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti untuk memahami, menilai, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan bahasa Inggris dalam artefak digital pemerintahan modern guna mendukung tata kelola publik yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran English-Mediated Digital Communication (EMDC) dalam meningkatkan efisiensi administrasi publik. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal ilmiah internasional, laporan kebijakan, prosiding konferensi, dan sumber akademik lain yang relevan dengan topik digital governance, interoperabilitas, literasi digital, penggunaan bahasa Inggris dalam artefak digital pemerintahan, serta kolaborasi lintas negara. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi berupa relevansi konten, keterkaitan dengan administrasi publik digital, dan periode publikasi 2010–2025, sementara sumber yang tidak memiliki hubungan substantif dengan topik penelitian dikeluarkan. Literatur terpilih dianalisis menggunakan sintesis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola, konsep, dan mekanisme pengaruh EMDC terhadap efisiensi administrasi—termasuk percepatan integrasi sistem, peningkatan transfer pengetahuan, adopsi inovasi, jangkauan layanan publik, serta risiko eksklusivitas linguistik dan ketergantungan pada platform berbahasa Inggris. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi analisis, sementara keseluruhan proses dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang padat, terukur, dan mendalam mengenai bagaimana EMDC membentuk efektivitas tata kelola publik di era digital.

B. E-GOVERNMENT DAN EFISIENSI ADMINISTRATIF

Perkembangan konsep *e-government* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan memiliki hubungan erat dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi.³³ Pemerintah yang mencapai tingkat kematangan digital lebih tinggi umumnya mampu menyediakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁴ Transformasi ini tidak hanya mencakup digitalisasi proses administratif, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola dari sistem birokrasi konvensional menuju model pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi.³⁵ Dalam konteks tersebut, e-government dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai publik (*public value*) melalui penggunaan teknologi digital secara berkelanjutan dan inklusif.³⁶

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan e-government adalah adanya kerangka interoperabilitas yang kuat antar-lembaga.³⁷ Interoperabilitas memungkinkan sistem digital dari berbagai instansi untuk saling terhubung dan berbagi informasi secara efisien tanpa hambatan teknis maupun administratif.³⁸ Dengan penerapan standar terbuka dan arsitektur sistem yang selaras, pemerintah dapat menghindari redundansi data, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalkan beban administratif yang timbul akibat proses manual dan tumpang tindih.³⁹ Studi-studi terkini juga menekankan bahwa interoperabilitas berperan penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor,

³³ Ines Mergel, *Digital Transformation of the Public Sector: Cases from the Digital Government Research Center* (Cham: Springer, 2019).

³⁴ OECD, *Digital Government Index 2020: Shaping Digital Transformation in the Public Sector* (Paris: OECD Publishing, 2020).

³⁵ Miriam Lips, *Digital Government: Managing Public Sector Reform in the Digital Era* (London: Routledge, 2020).

³⁶ Yu-Che Chen, "Digital Governance: Building Resilience in Public Administration," *Government Information Quarterly* 39, no. 2 (2022): 101681.

³⁷ European Commission, *New European Interoperability Framework: Promoting Seamless Services and Data Flows* (Brussels: Publications Office of the European Union, 2017).

³⁸ OECD, *Digital Government Review of Latin America: Building Inclusive and Trustworthy Public Services* (Paris: OECD Publishing, 2022).

³⁹ Min-Seok Pang, "IT Capabilities and E-Government Efficiency: Evidence from Cross-Country Data," *Information Systems Research* 31, no. 1 (2020): 56–74.

mempercepat respons kebijakan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.⁴⁰

Lebih jauh lagi, e-government berkontribusi langsung terhadap efisiensi administratif melalui proses otomasi dan optimalisasi sumber daya.⁴¹ Implementasi teknologi seperti *cloud computing*, *big data analytics*, dan *artificial intelligence* memungkinkan lembaga pemerintahan mengelola data publik secara lebih cerdas dan terintegrasi.⁴² Dengan demikian, proses pelayanan publik dapat dilakukan secara *streamlined*, yakni lebih sederhana, cepat, dan berorientasi hasil (*outcome-oriented*).⁴³ Namun demikian, literatur terbaru juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara efisiensi digital dan aspek akuntabilitas serta etika dalam penyelenggaraan pemerintahan digital agar inovasi teknologi tidak mengorbankan prinsip transparansi dan keadilan sosial.⁴⁴

Oleh karena itu, E-government berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan efisiensi administrasi publik melalui digitalisasi proses birokrasi dan penerapan teknologi seperti *cloud computing*, *big data*, dan *AI*. Interoperabilitas antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan karena memungkinkan pertukaran data yang cepat, mengurangi duplikasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya menciptakan alur kerja yang lebih efisien, tetapi juga menuntut keseimbangan antara inovasi teknologi dengan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.

⁴⁰ Yu-Che Chen and Micah Altman, "Digital Democracy and Public Governance: Governance Innovation and the Challenge of Inclusion," *Government Information Quarterly* 38, no. 3 (2021): 101568.

⁴¹ Ines Mergel, *Public Management in the Digital Era: Digital Transformation and Value Co-Creation* (London: Routledge, 2021).

⁴² J. Ramon Gil-Garcia, Theresa A. Pardo, and Luis F. Luna-Reyes, "Digital Government and Artificial Intelligence: Toward Public Sector Data Ecosystems," *Government Information Quarterly* 39, no. 4 (2022): 101735.

⁴³ United Nations, *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government* (New York: UN Department of Economic and Social Affairs, 2022).

⁴⁴ Shannon Vallor, *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting* (Oxford: Oxford University Press, 2016).

C. *ENGLISH AS A LINGUA FRANCA (ELF)* DALAM KONTEKS INSTITUSIONAL DAN DIGITAL

Dalam dua dekade terakhir, konsep *English as a Lingua Franca* (ELF) telah berkembang menjadi salah satu kerangka utama untuk memahami fungsi bahasa Inggris dalam komunikasi lintas-budaya dan lintas-institusional. ELF dipahami bukan sebagai variasi baku bahasa Inggris, melainkan sebagai praktik komunikasi yang berorientasi pada pemahaman bersama antara penutur dari latar belakang bahasa yang berbeda. Di lingkungan institusional—terutama di sektor pemerintahan, akademik, dan korporasi—bahasa Inggris berperan sebagai medium kerja yang memungkinkan koordinasi, pertukaran informasi, serta produksi pengetahuan lintas batas. Penggunaan ELF dalam konteks ini menegaskan bahwa bahasa tidak semata alat komunikasi, tetapi juga instrumen kebijakan dan kolaborasi internasional yang mendukung efisiensi dan transparansi kelembagaan.⁴⁵

Dalam ranah digital, dominasi bahasa Inggris semakin menguat melalui berbagai artefak komunikasi seperti dokumentasi teknis, platform perangkat lunak, standar internasional, serta forum daring seperti *open-source communities*. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ELF berfungsi sebagai *lingua franca digital* yang menopang interoperabilitas dan inovasi global. Namun, penelitian mutakhir menyoroti bahwa keberhasilan komunikasi melalui ELF tidak dapat diasumsikan hanya karena semua pihak menggunakan bahasa Inggris.⁴⁶ Faktor-faktor seperti tingkat kefasihan, konteks sosial, dan kesadaran antarbudaya memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas komunikasi digital lintas bahasa. Dengan demikian, ELF dalam konteks digital lebih tepat dipandang sebagai proses negosiasi makna yang dinamis, bukan sebagai penggunaan bahasa Inggris yang seragam.⁴⁷

Lebih jauh, riset mengenai ELF di lingkungan digital dan kelembagaan menunjukkan bahwa praktik komunikasi ini juga membawa implikasi sosial dan epistemologis. Dalam konteks pemerintahan digital dan administrasi publik, misalnya, penggunaan ELF dapat mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan, tetapi sekaligus berpotensi menciptakan

⁴⁵ Jenkins, Jennifer, Will Baker, and Martin Dewey. *The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca*. 2nd ed. London: Routledge, 2018.

⁴⁶ Seidlhofer, Barbara. "English as a Lingua Franca: Changing Attitudes to English." In *The Handbook of English Linguistics*, edited by Bas Aarts and April McMahon, 2nd ed., 621–637. Oxford: Wiley-Blackwell, 2021.

⁴⁷ Björkman, Beyza. *English as a Lingua Franca in the Digital World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

ketimpangan akses bagi aktor yang kurang kompeten berbahasa Inggris.⁴⁸ Hal ini menuntut pendekatan yang lebih reflektif terhadap kebijakan bahasa dalam sistem digital pemerintahan, agar penggunaan bahasa Inggris tidak menjadi sumber eksklusi linguistik. Karenanya, studi ELF kontemporer menekankan pentingnya kesadaran multibahasa dan kompetensi interkultural dalam mengelola komunikasi digital lintas batas di era global.⁴⁹

Jadi, *English as a Lingua Franca* (ELF) berperan sebagai sarana komunikasi lintas bahasa yang memungkinkan kolaborasi global di lingkungan institusional dan digital. Dalam konteks pemerintahan dan teknologi, ELF mendukung interoperabilitas dan pertukaran pengetahuan melalui artefak digital seperti dokumentasi teknis dan standar internasional. Namun, efektivitasnya bergantung pada kompetensi antarbudaya dan kefasihan pengguna, sementara dominasi bahasa Inggris juga berpotensi menciptakan eksklusi bagi pihak yang kurang menguasainya.

3. Literasi Digital dan Kemampuan Bahasa

Literasi digital merupakan fondasi utama dalam pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik. Konsep ini tidak sekadar mencakup kemampuan teknis untuk mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi, keamanan data, serta kemampuan beradaptasi terhadap inovasi teknologi. Aparatur publik yang memiliki tingkat literasi digital tinggi lebih mampu mengintegrasikan sistem elektronik, memanfaatkan data secara efektif, dan memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat.⁵⁰ Dalam konteks pemerintahan digital, literasi digital berfungsi sebagai jembatan antara inovasi teknologi dan penerapannya dalam proses administrasi yang kompleks, sekaligus menjadi faktor kunci dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.⁵¹

⁴⁸ Kankaanranta, Anne, and Leena Louhiala-Salminen. "ELF in the Digital Workplace: Intercultural Communication Revisited." *Journal of English as a Lingua Franca* 8, no. 2 (2019): 275–298.

⁴⁹ Mauranen, Anna. "Emergent Multilingualism in ELF and Digital Communication." *World Englishes* 39, no. 2 (2020): 263–277.

⁵⁰ Reddy, P. G. "Digital Literacy and Public Service Delivery in the Digital Era." *Government Information Quarterly* 38, no. 4 (2021): 101–123. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101646>

⁵¹ Van Laar, Ester, Alexander J. A. M. van Deursen, and Jan A. G. M. van Dijk. "Measuring the Levels of 21st-Century Digital Skills among Professionals Working within the EU." *Computers in Human Behavior* 72 (2017): 377–388.

Namun, literasi digital tidak dapat dilepaskan dari kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris, yang berfungsi sebagai *lingua franca* dalam komunikasi digital dan teknis. Kemampuan membaca dan memahami dokumentasi teknis, standar internasional, serta berinteraksi dengan vendor global menuntut kecakapan bahasa yang memadai.⁵² Tanpa kompetensi bahasa Inggris, aparatur publik mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya digital global, memperlambat proses inovasi, dan menghambat adopsi teknologi baru. Dengan demikian, kemampuan bahasa berperan sebagai lapisan tambahan dari literasi digital, yang memperluas kapasitas seseorang untuk terlibat dalam ekosistem teknologi global secara aktif dan produktif.⁵³

Interseksi antara literasi digital dan kemampuan bahasa Inggris menjadi krusial dalam konteks *English-Mediated Digital Communication* (EMDC). Semakin tinggi literasi digital dan kompetensi bahasa Inggris, semakin besar potensi suatu institusi untuk mengoptimalkan penggunaan platform digital berbasis bahasa Inggris dalam administrasi publik.⁵⁴ Sebaliknya, kesenjangan di salah satu aspek ini dapat mengurangi efisiensi, memperlambat transformasi digital, dan memperlebar jurang digital di antara aparatur maupun warga. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang disertai peningkatan kompetensi bahasa menjadi strategi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi e-government dan integrasi sistem administrasi publik yang berkelanjutan di era globalisasi.⁵⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Literasi digital dan kemampuan bahasa Inggris saling mendukung efektivitas administrasi publik digital. Literasi digital memungkinkan aparatur mengelola sistem teknologi, sementara bahasa Inggris membuka akses ke dokumentasi teknis dan kolaborasi global. Kedua kompetensi ini penting untuk keberhasilan *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) dan *e-government*.

⁵² Khalid, Faiza, and Chris Cowan. "Digital Literacy, English Proficiency, and Access to Online Knowledge: A Framework for Public Sector Competency." *Information Technology & People* 33, no. 6 (2020): 1956–1973.

⁵³ Ng, Wan. "Integrating Digital Literacy and Language Competence in the Workplace." *Education and Information Technologies* 24, no. 2 (2019): 1893–1909.

⁵⁴ Alizadeh, Minoo. "Digital Competence and English Proficiency in the Context of Globalized Governance." *Journal of Language and Intercultural Communication* 21, no. 4 (2021): 478–495.

⁵⁵ Yoon, Sook Kyung, and Taeho Park. "Bridging Digital and Linguistic Divides: The Role of English-Mediated Communication in E-Government." *Telecommunications Policy* 46, no. 7 (2022): 102346

D. CMC (COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION)

Computer-Mediated Communication (CMC) merujuk pada proses pertukaran pesan dan interaksi sosial yang berlangsung melalui perantara teknologi digital, seperti komputer, internet, atau perangkat seluler. Dengan kata lain, CMC menggambarkan bagaimana individu atau kelompok berkomunikasi secara elektronik—baik secara sinkron maupun asinkron—untuk tujuan personal, profesional, maupun kelembagaan. Bentuk komunikasi ini mencakup email, pesan instan, konferensi video, media sosial, dan berbagai platform kolaborasi daring.⁵⁶ Menurut Yao dan Ling (2020), definisi CMC kini tidak hanya berfokus pada komputer sebagai alat komunikasi, tetapi juga pada proses mediasi yang terjadi di antara manusia, media, dan konteks sosial yang mengitarinya. Mereka menegaskan bahwa teknologi tidak sekadar menjadi perantara, tetapi juga memengaruhi pola interaksi, makna pesan, dan dinamika hubungan sosial di ruang digital.⁵⁷

Selain itu, penelitian Treem dan Leonardi (2017) menyoroti bahwa komunikasi berbasis teknologi menghadirkan karakteristik unik, seperti visibilitas, ketereditan, persistensi, dan asosiasi. Aspek-aspek ini memungkinkan komunikasi menjadi lebih efisien dan transparan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tantangan seperti berkurangnya isyarat nonverbal dan meningkatnya ketergantungan pada kompetensi literasi digital.⁵⁸ Oleh karena itu, pemahaman tentang CMC sangat penting untuk konteks profesional modern, termasuk administrasi publik dan *e-government*, di mana kolaborasi lintas batas dan penggunaan bahasa digital (seperti *English-Mediated Digital Communication*) menjadi semakin dominan.⁵⁹

⁵⁶ Linda Tay and Yin Ling Cheung, "Second and Foreign Language Writing and Computer-Mediated Communication: A Qualitative Meta-Synthesis of Recent Research," *Issues in Language Studies* 8, no. 2 (2019): 1–26, <https://publisher.unimas.my/ojs/index.php/ILS/article/view/1477>

⁵⁷ Mike Z. Yao and Rich Ling, "What Is Computer-Mediated Communication?—An Introduction to the Special Issue," *Journal of Computer-Mediated Communication* 25, no. 1 (2020): 4–8, <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmz027>

⁵⁸ Jeffrey W. Treem and Paul M. Leonardi, "Social Media Use in Organizations: Exploring the Affordances of Visibility, Editability, Persistence, and Association," *Annals of the International Communication Association* 40, no. 3 (2017): 239–275, <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1332967>

⁵⁹ Yao and Ling, "What Is Computer-Mediated Communication?," 7.

E. PEMBAHASAN

1. Fenomena *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) dalam Administrasi Publik

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menghadirkan tuntutan baru terkait integrasi sistem antar-lembaga, percepatan layanan, transparansi informasi, dan koordinasi yang lebih efektif. Dalam konteks ini, bahasa Inggris berperan sebagai *lingua franca* utama dalam artefak digital pemerintahan, termasuk dokumentasi teknis, standar internasional, antarmuka pemrograman aplikasi (API), platform vendor, dan komunitas *open-source*. Fenomena ini dikenal sebagai *English-Mediated Digital Communication* (EMDC), di mana bahasa Inggris menjadi bahasa operasional artefak digital dalam administrasi publik. EMDC memfasilitasi komunikasi lintas lembaga dan negara, memperluas akses terhadap literatur internasional, serta mempermudah penerapan praktik terbaik global, sehingga menjadi bagian penting dari kapasitas administratif modern di era pemerintahan yang terdigitalisasi dan terglobalisasi.

Keberadaan EMDC menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan dimensi linguistik dan kultural. Bahasa Inggris berfungsi sebagai mediator dalam pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan pengambilan keputusan lintas negara. Oleh karena itu, kemampuan aparatur publik dalam menguasai EMDC menjadi indikator kesiapan institusi menghadapi tantangan pemerintahan digital yang kompleks dan terintegrasi secara global.

Di sisi lain, implementasi EMDC juga menimbulkan tantangan terkait inklusi dan aksesibilitas. Aparatur maupun warga yang kurang menguasai bahasa Inggris berisiko tertinggal dalam memanfaatkan sistem digital, sementara dominasi bahasa Inggris dalam artefak digital dapat meningkatkan ketergantungan pada platform dan standar internasional. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan bahasa Inggris aparatur perlu diimbangi dengan kebijakan multibahasa dan pelatihan literasi digital, sehingga transformasi digital administrasi publik dapat berlangsung secara efisien, inovatif, inklusif, dan berkeadilan.

Namun, penelitian juga menekankan risiko eksklusi akibat dominasi bahasa Inggris

dalam artefak digital. Aparatur atau warga yang kurang menguasai bahasa Inggris berpotensi tertinggal dalam memanfaatkan sistem digital, sementara ketergantungan pada platform internasional dapat meningkat. Temuan ini konsisten dengan teori literasi digital, yang menekankan bahwa kemampuan teknis harus disertai kompetensi bahasa agar digitalisasi institusi efektif.⁶⁰ Oleh karena itu, pengembangan kemampuan bahasa Inggris aparatur perlu diimbangi dengan kebijakan multibahasa dan pelatihan literasi digital agar transformasi digital administrasi publik dapat berlangsung efisien, inklusif, dan berkeadilan.

2. Dampak EMDC terhadap Efisiensi Administrasi Publik

Kajian literatur menunjukkan bahwa *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi administrasi publik. Efisiensi ini dipahami secara luas, meliputi pengurangan waktu transaksi, penurunan beban administratif, percepatan adopsi sistem baru, optimalisasi sumber daya antar-lembaga, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Aparatur publik yang menguasai EMDC cenderung lebih cepat memahami dokumentasi teknis, mengintegrasikan modul sistem, dan menyelesaikan proses administratif dibandingkan mereka yang kurang menguasai bahasa Inggris. Selain itu, EMDC memfasilitasi transfer pengetahuan antar lembaga dan kolaborasi internasional, memungkinkan birokrasi merespons tuntutan global dengan lebih efektif. Dampak positif lain dari EMDC termasuk peningkatan inovasi, kemudahan akses terhadap praktik terbaik global, percepatan digitalisasi layanan, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Dengan kata lain, EMDC tidak hanya meningkatkan kinerja internal, tetapi juga memperkuat posisi institusi dalam jaringan pemerintahan dan organisasi global.

Di sisi lain, penggunaan EMDC juga menimbulkan beberapa risiko dan dampak negatif. Aparatur atau warga yang memiliki kemampuan bahasa Inggris terbatas berpotensi mengalami eksklusi digital, sehingga menimbulkan kesenjangan akses dalam pemanfaatan layanan publik. Dominasi bahasa Inggris dalam dokumentasi teknis, standar internasional, dan platform digital juga dapat meningkatkan ketergantungan pada vendor atau teknologi asing yang mungkin kurang sesuai dengan konteks lokal, serta mengurangi kemandirian

⁶⁰ Reddy, P. G. "Digital Literacy and Public Service Delivery in the Digital Era." *Government Information Quarterly* 38, no. 4 (2021): 101–123

nasional dalam pengelolaan layanan publik. Risiko lainnya termasuk potensi miskomunikasi akibat perbedaan interpretasi bahasa, serta kesulitan dalam menyosialisasikan kebijakan dan prosedur kepada masyarakat yang lebih nyaman menggunakan bahasa lokal. Oleh karena itu, implementasi EMDC perlu diimbangi dengan kebijakan multibahasa, pelatihan literasi digital, dan strategi inklusif yang memastikan semua pemangku kepentingan dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Pendekatan seimbang ini penting agar transformasi digital administrasi publik dapat menghadirkan manfaat maksimal sekaligus meminimalkan dampak negatif sosial dan teknis.

Kajian literatur menunjukkan bahwa English-Mediated Digital Communication (EMDC) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi administrasi publik di berbagai negara. Efisiensi tersebut mencakup beragam dimensi seperti percepatan waktu transaksi, pengurangan beban administratif, optimalisasi sumber daya antarlembaga, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi birokrasi melalui penggunaan bahasa Inggris dalam platform digital. Aparatur publik yang memiliki kompetensi tinggi dalam EMDC lebih cepat memahami dokumentasi teknis, mengintegrasikan sistem informasi baru, dan menyelesaikan proses administratif secara efektif dibandingkan mereka yang kurang terampil dalam bahasa Inggris. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris berhubungan erat dengan peningkatan kompetensi digital, akses terhadap dokumentasi teknis global, serta partisipasi dalam sistem digital pemerintahan lintas batas.⁶¹ Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi digital turut memperkuat kemampuan birokrasi untuk berpartisipasi dalam jaringan pengetahuan internasional, mempercepat adopsi inovasi, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru dan praktik terbaik global.⁶² Dengan demikian, EMDC tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga memperkuat posisi institusi publik dalam jaringan pemerintahan dan organisasi global.⁶³

⁶¹ Minoo Alizadeh, "Digital Competence and English Proficiency in the Context of Globalized Governance," *Journal of Language and Intercultural Communication* 21, no. 4 (2021): 478–495.

⁶² Tanja Aitamurto and Hélène Landemore, "Crowdsourced Deliberation: The Case of the Law on Off-Road Traffic in Finland," *Policy & Internet* 7, no. 2 (2015): 174–204.

⁶³ Péter Kónya, "The Impact of Digitalized Communication on the Effectiveness of Local Administrative Authorities: Findings from Central European Countries in the COVID-19 Crisis," *Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics* 13, no. 1 (2022): 55–75.

Namun demikian, penggunaan EMDC juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam konteks administrasi publik. Salah satu risiko utama adalah munculnya kesenjangan digital-linguistik, di mana aparaturnya atau masyarakat yang kurang menguasai bahasa Inggris cenderung tertinggal dalam mengakses informasi dan memanfaatkan layanan digital pemerintah.⁶⁴ Kondisi ini berpotensi menciptakan eksklusivitas digital serta memperlebar kesenjangan layanan antara kelompok dengan tingkat literasi bahasa Inggris yang berbeda. Selain itu, dominasi bahasa Inggris dalam dokumentasi teknis dan standar internasional dapat meningkatkan ketergantungan pada teknologi atau vendor asing yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan lokal.⁶⁵ Dalam konteks lain, penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan bahasa dapat menyebabkan miskomunikasi dan menurunkan efektivitas interaksi daring, khususnya bagi pengguna dari konteks bahasa kedua.⁶⁶ Oleh karena itu, implementasi EMDC perlu diimbangi dengan kebijakan multibahasa dan literasi digital yang inklusif, serta strategi pelatihan bagi aparaturnya dan masyarakat agar transformasi digital dapat berlangsung tanpa meninggalkan kelompok tertentu.⁶⁷ Pendekatan seimbang ini penting untuk memastikan bahwa manfaat EMDC dalam peningkatan efisiensi dan inovasi birokrasi dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif sosial maupun teknis.⁶⁸

Adapun beberapa dampak positif dan negatif EMDC terhadap efisiensi administrasi publik yaitu:

⁶⁴ Eka Pratiwi and Nur Aisyah, "Digital Literacy and Its Impact on English Learning Comprehension: Evidence from Private Higher Education Institutions in Jakarta," *Journal of Language and Society Studies* 6, no. 2 (2023): 115–130.

⁶⁵ Ahmad Fauzi, "Implementation of Technology-Based Public Service Innovation in Increasing Bureaucratic Efficiency: The Role of Education in Improving Service Performance," *Journal of Education and Learning Evaluation* 8, no. 1 (2022): 45–56.

⁶⁶ Ni Luh Ayu Kartika and I Nyoman Sudiana, "Navigating English-Mediated Online Discourse: Communication Strategies of Indonesian EFL Learners in Online Discussions," *Journal of Applied Studies in Language* 9, no. 1 (2023): 33–45.

⁶⁷ Yuliana Permata and Iwan Satria, "Local Government Use of Websites and Social Media as Communication Tools: Challenges and Potentials," *Jurnal Sosial dan Manajemen* 12, no. 3 (2021): 251–263.

⁶⁸ Fauzi, "Implementation of Technology-Based Public Service Innovation," 2022.

Tabel 1
Dampak Positif dan Negatif EMDC terhadap Administrasi Publik

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Efisiensi Administratif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan waktu transaksi - Penurunan beban administratif - Percepatan adopsi sistem baru 	- Aparatur yang kurang fasih bahasa Inggris mungkin tertinggal dalam pemanfaatan sistem
Koordinasi dan Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi antar-lembaga - Mempermudah kolaborasi internasional 	- Risiko miskomunikasi akibat perbedaan interpretasi bahasa
Akses Pengetahuan dan Praktik Terbaik	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas akses ke literatur dan standar internasional - Memfasilitasi transfer pengetahuan 	- Ketergantungan pada platform atau standar asing yang mungkin kurang sesuai konteks lokal
Inovasi dan Adaptasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat inovasi digital - Meningkatkan adaptasi terhadap teknologi baru 	- Potensi kesenjangan digital antara aparatur/warga yang fasih dan yang tidak
Inklusi dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong praktik administrasi berbasis standar global 	- Risiko eksklusi bagi warga atau aparatur yang kurang menguasai bahasa Inggris

Dengan demikian, *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) memainkan peran strategis dalam meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan inovasi dalam administrasi publik di era digital. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, termasuk percepatan adopsi sistem, integrasi lintas lembaga, dan akses ke praktik terbaik global, EMDC juga membawa tantangan berupa risiko eksklusi, ketergantungan pada teknologi asing, dan kesenjangan kemampuan bahasa. Oleh karena itu, implementasi EMDC perlu disertai kebijakan multibahasa, pelatihan literasi digital, dan strategi inklusif agar transformasi digital dapat berlangsung secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan yang seimbang ini memastikan bahwa teknologi dan bahasa tidak hanya menjadi sarana efisiensi, tetapi juga mendukung pemerintahan yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap tuntutan global.

3. Kompleksitas EMDC di Negara Berkembang dan Lingkungan Multibahasa

Fenomena *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) menjadi lebih kompleks ketika diterapkan di negara-negara berkembang maupun di konteks multibahasa. Perbedaan tingkat kemampuan bahasa Inggris, literasi digital, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi faktor penentu utama keberhasilan transformasi digital. Ketidakmerataan akses ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat atau aparatur yang dapat memanfaatkan sistem administrasi digital dan mereka yang kurang terjangkau oleh teknologi.

Dalam konteks tersebut, pertanyaan kritis muncul mengenai strategi untuk mengoptimalkan EMDC agar tetap inklusif dan responsif terhadap keragaman bahasa lokal. Penguasaan bahasa Inggris oleh aparatur harus dibarengi dengan kesadaran terhadap konteks linguistik dan budaya lokal agar layanan digital dapat diakses secara merata. Kajian terhadap praktik terbaik internasional perlu disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memastikan digitalisasi administrasi publik relevan dengan kebutuhan nasional sekaligus efisien.

Pendekatan yang seimbang ini menekankan bahwa teknologi dan bahasa harus berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial, bukan sumber eksklusi baru. Implementasi EMDC yang efektif memerlukan integrasi strategi multibahasa, pelatihan literasi digital, dan kebijakan inklusif yang mampu menjembatani perbedaan kemampuan bahasa dan akses teknologi. Dengan demikian, transformasi digital dapat mendorong pemerintahan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

4. Faktor Pendorong dan Hambatan EMDC

Keberhasilan implementasi *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satu faktor utama adalah kompetensi digital aparatur, yang mencakup kemampuan mengoperasikan sistem, memahami dokumentasi teknis, dan mengintegrasikan modul digital secara efektif. Selain itu, penguasaan bahasa Inggris menjadi elemen krusial, karena sebagian besar artefak digital, standar internasional, dan panduan vendor disajikan dalam bahasa ini. Dukungan kebijakan yang jelas dan infrastruktur TIK yang memadai juga memperkuat kemampuan institusi

untuk mengimplementasikan EMDC secara efisien.

Di sisi lain, terdapat sejumlah hambatan yang dapat mengurangi efektivitas EMDC. Keterbatasan literasi digital dan bahasa Inggris pada aparatur atau warga dapat menimbulkan kesulitan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan sistem digital. Ketergantungan pada platform atau standar internasional berbahasa Inggris juga berpotensi membatasi fleksibilitas institusi dan meningkatkan risiko ketidakcocokan dengan konteks lokal. Hambatan-hambatan ini menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga melibatkan faktor linguistik, sosial, dan budaya.

Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan dan praktik administrasi publik yang lebih efektif, adaptif, dan inklusif. Dengan strategi yang mempertimbangkan kompetensi aparatur, kemampuan bahasa, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan, EMDC dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan eksklusi digital. Pendekatan ini memungkinkan transformasi digital menjadi alat yang mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam layanan publik.

Tabel.2
Pendukung dan Penghambat EMDC

Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kompetensi Aparatur	<ul style="list-style-type: none">- Literasi digital yang tinggi- Kemampuan bahasa Inggris yang memadai- Pengalaman teknis dan adaptasi terhadap teknologi	<ul style="list-style-type: none">- Literasi digital rendah- Kemampuan bahasa Inggris terbatas- Kurangnya pengalaman dengan sistem digital
Infrastruktur & Teknologi	<ul style="list-style-type: none">- Infrastruktur TIK yang memadai- Standar interoperabilitas antar sistem- Dukungan platform digital internasional	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan infrastruktur TIK- Ketergantungan berlebihan pada platform berbahasa Inggris- Sistem yang tidak kompatibel dengan konteks lokal
Kebijakan & Dukungan Institusi	<ul style="list-style-type: none">- Kebijakan yang mendukung transformasi digital- Pelatihan dan program peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kebijakan yang jelas- Minimnya dukungan pelatihan- Resistensi terhadap

	aparatur - Komitmen manajemen	perubahan dalam institusi
Akses & Inklusi Sosial	- Program inklusi digital - Kesadaran multibahasa dalam pelayanan public	- Potensi eksklusi warga atau aparatur tertentu - Kesenjangan kemampuan bahasa dan akses teknologi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *English-Mediated Digital Communication* (EMDC) bergantung pada keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat di berbagai dimensi, mulai dari kompetensi aparatur hingga aspek kebijakan dan inklusi sosial. Sejalan dengan temuan ini, penelitian yang dilakukan oleh Péter Kónya (2022) menegaskan bahwa efektivitas komunikasi digital dalam lembaga administrasi publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, serta dukungan kebijakan internal yang konsisten terhadap inovasi digital.⁶⁹ Studi tersebut juga menunjukkan bahwa institusi dengan tingkat literasi digital dan kompetensi bahasa Inggris yang tinggi cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan sistem komunikasi berbasis teknologi secara efisien. Dengan demikian, pendekatan yang menekankan penguatan kompetensi, penyediaan infrastruktur memadai, serta kebijakan yang adaptif menjadi kunci untuk memastikan bahwa EMDC dapat berfungsi optimal sebagai sarana peningkatan efisiensi dan keterbukaan administrasi publik di era digital.

5. Mekanisme Pengaruh

a. Interopabilitas dan Integrasi Teknis

Pemahaman bahasa Inggris oleh aparatur publik memegang peran penting dalam mendukung interoperabilitas dan integrasi sistem digital. Banyak dokumentasi teknis, standar internasional, API, dan pedoman pengadaan disajikan dalam bahasa Inggris.

⁶⁹ Péter Kónya, "The Impact of Digitalized Communication on the Effectiveness of Local Administrative Authorities: Findings from Central European Countries in the COVID-19 Crisis," *Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics* 13, no. 1 (2022): 55–75.

Aparatur yang menguasai bahasa Inggris dapat lebih cepat mengakses materi dari vendor, menyesuaikan praktik terbaik, serta mengintegrasikan berbagai modul sistem tanpa membutuhkan terjemahan yang ekstensif.⁷⁰ Kemampuan ini memungkinkan percepatan implementasi sistem, pengurangan waktu penyelesaian masalah teknis, dan pengurangan ketergantungan pada vendor asing. Dengan demikian, integrasi teknis tidak hanya bergantung pada kecanggihan platform, tetapi juga pada kompetensi bahasa aparatur dalam memahami dan memanfaatkan artefak digital lintas batas.⁷¹

Jadi, Penguasaan bahasa Inggris oleh aparatur publik memfasilitasi interoperabilitas dan integrasi sistem digital dengan memungkinkan akses cepat ke dokumentasi teknis, standar internasional, dan API tanpa terjemahan ekstensif. Kemampuan ini mempercepat implementasi sistem, menyelesaikan masalah teknis lebih efisien, dan mengurangi ketergantungan pada vendor asing, sehingga efektivitas administrasi publik meningkat.

b. Akuisisi Pengetahuan dan Adopsi Inovasi

Penguasaan bahasa Inggris memberikan aparatur publik akses ke beragam sumber pengetahuan global, termasuk penelitian terbaru, forum teknis, dokumentasi standar internasional, dan komunitas *open source*. Akses ini memungkinkan institusi memperoleh informasi terkini mengenai teknologi, kebijakan, dan praktik administrasi publik dari berbagai negara, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan berbasis bukti. Dengan kata lain, kemampuan berbahasa Inggris memperluas kapasitas institusi untuk memanfaatkan pengetahuan eksternal secara efektif.

Selain itu, EMDC memfasilitasi adopsi inovasi dalam administrasi publik dengan lebih cepat. Aparatur dapat menerapkan praktik terbaik internasional tanpa harus memulai proses dari awal, mempercepat digitalisasi layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, EMDC berperan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat adaptasi, inovasi, dan responsivitas institusi terhadap tuntutan global dan transformasi digital.

⁷⁰ Janssen, Marijn, and Yannis Charalabidis. "Interoperability in E-Government: The Role of Language and Documentation." *Government Information Quarterly* 36, no. 4 (2019): 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.004>

⁷¹ Chen, Yu, and Scott Shackelford. "Digital Integration and Public Administration Efficiency: The English-Language Factor." *International Journal of Public Sector Management* 33, no. 7 (2020): 789–805

c. Kerjasama Internasional, Pendanaan & Manajemen Proyek

Dalam program lintas negara atau proyek yang didanai donor, bahasa Inggris sering digunakan sebagai *lingua franca* untuk berbagai dokumen administratif, termasuk *request for proposal* (RFP), laporan proyek, kontrak dengan vendor, dan koordinasi antar-mitra. Penggunaan bahasa Inggris dalam konteks ini memfasilitasi komunikasi yang lebih jelas dan konsisten antar-pihak dari berbagai latar belakang bahasa, sehingga meminimalkan risiko miskomunikasi dan interpretasi yang salah.

Selain itu, EMDC dapat menurunkan biaya transaksi dalam kerja sama internasional dengan mempercepat proses negosiasi, meningkatkan efisiensi koordinasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan demikian, bahasa Inggris bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat kerja sama lintas negara, mendukung implementasi proyek secara lebih efektif, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan program.

d. Jangkauan Terpilih ke Warga/Pemangku Kepentingan

Dalam konteks negara multibahasa atau layanan yang memiliki orientasi internasional, seperti pendaftaran bisnis bagi investor asing, penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi digital dapat memperluas jangkauan layanan publik. Bahasa Inggris berfungsi sebagai sarana untuk menjangkau warga atau pemangku kepentingan yang tidak menggunakan bahasa lokal, sehingga mereka tetap dapat mengakses informasi dan layanan secara efektif tanpa hambatan linguistik.

Selain itu, EMDC dapat mengurangi beban pusat bantuan atau *help-desk*, karena informasi dan panduan digital tersedia dalam bahasa yang dipahami oleh pengguna internasional. Hal ini memperlancar proses layanan publik bagi warga asing atau entitas internasional, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung terciptanya administrasi publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan global.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

English-Mediated Digital Communication (EMDC) memainkan peran strategis dalam administrasi publik modern sebagai lingua franca yang menghubungkan dokumentasi teknis, standar internasional, platform digital global, serta ekosistem open source. Penguasaan bahasa Inggris oleh aparatur publik memungkinkan interoperabilitas sistem berjalan lebih lancar, mempercepat adopsi inovasi, dan memperkuat koordinasi antarlembaga maupun antarnegara. Dampak positif EMDC terlihat pada peningkatan efisiensi administratif, termasuk percepatan proses digitalisasi, peningkatan akurasi penyelesaian tugas, perluasan akses terhadap pengetahuan dan praktik terbaik global, serta penguatan kolaborasi internasional dalam pengembangan layanan publik berbasis teknologi. Aparatur yang kompeten dalam EMDC lebih mampu memahami instruksi teknis, mengoperasikan platform global, dan memanfaatkan dokumentasi atau API berbahasa Inggris untuk mempercepat implementasi sistem digital baru.

Namun, dominasi bahasa Inggris dalam ekosistem digital juga menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko, terutama bagi negara berkembang dan masyarakat multibahasa. Kesenjangan literasi bahasa dan digital dapat memicu eksklusi bagi aparatur maupun warga yang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris memadai, sehingga menghambat pemanfaatan layanan publik digital. Selain itu, ketergantungan pada platform internasional dan standar teknologi asing berpotensi membatasi fleksibilitas lokal, memperkuat asimetri kekuasaan digital, dan memunculkan risiko ketergantungan struktural. Keberhasilan penerapan EMDC sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kompetensi aparatur, kesiapan infrastruktur TIK, kebijakan institusi, serta program inklusi digital, sementara hambatan dapat muncul dari resistensi birokrasi, rendahnya kapasitas linguistik dan teknologi, dan lemahnya kebijakan penguatan kemandirian digital. Secara keseluruhan, EMDC memengaruhi administrasi publik melalui mekanisme kunci seperti optimalisasi interoperabilitas, akselerasi adopsi inovasi global, penguatan kerja sama internasional, dan perluasan jangkauan layanan publik terhadap warga multibahasa serta pemangku kepentingan lintas negara.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan mengenai peran dan tantangan English-Mediated Digital Communication (EMDC) dalam administrasi publik, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan. Pertama, pengembangan kapasitas aparatur menjadi prioritas, termasuk melalui pelatihan bahasa Inggris khusus administrasi publik dan peningkatan literasi digital, sehingga aparatur mampu memahami dokumentasi teknis, mengintegrasikan sistem digital, serta memanfaatkan praktik terbaik internasional secara efektif. Kedua, kebijakan multibahasa dan pendekatan inklusif perlu diterapkan, seperti penyediaan terjemahan atau panduan lokal, serta program inklusi digital, untuk memastikan warga dan aparatur dengan kemampuan bahasa terbatas tetap dapat mengakses layanan publik secara optimal. Ketiga, optimalisasi infrastruktur dan teknologi menjadi faktor penunjang, dengan memastikan interoperabilitas antar-sistem, kesesuaian platform dengan konteks lokal, serta pengurangan ketergantungan berlebihan pada vendor atau standar asing. Keempat, pemanfaatan EMDC untuk kerja sama internasional harus dilakukan secara strategis, termasuk dalam proyek lintas negara dan pendanaan global, dengan tetap menjaga akurasi komunikasi lintas bahasa. Terakhir, evaluasi dan monitoring secara berkala perlu dilakukan untuk menilai dampak EMDC terhadap efisiensi, inovasi, inklusi, serta adaptasi aparatur, sehingga strategi pengembangan kemampuan bahasa dan literasi digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata institusi. Dengan pendekatan ini, implementasi EMDC diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan aksesibilitas administrasi publik, sekaligus meminimalkan risiko eksklusi dan ketergantungan pada teknologi asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizadeh, Minoo. "Digital Competence and English Proficiency in the Context of Globalized Governance." *Journal of Language and Intercultural Communication* 21, no. 4 (2021): 478–495.
- Aitamurto, Tanja, and Hélène Landemore. "Crowdsourced Deliberation: The Case of the Law on Off-Road Traffic in Finland." *Policy & Internet* 7, no. 2 (2015): 174–196.
- Björkman, Beyza. *English as a Lingua Franca in the Digital World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

- Blommaert, Jan. *The Sociolinguistics of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Cameron, Deborah. *Working with Spoken Discourse*. London: Sage Publications, 2001.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
- Chadwick, Andrew. *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Chen, Yu-Che. *Managing Digital Governance: Design, Strategy, and Practice*. New York: Routledge, 2017.
- Chen, Yu-Che. "Digital Governance: Building Resilience in Public Administration." *Government Information Quarterly* 39, no. 2 (2022): 101681.
- Chen, Yu-Che, and Micah Altman. "Digital Democracy and Public Governance: Governance Innovation and the Challenge of Inclusion." *Government Information Quarterly* 38, no. 3 (2021): 101568.
- Cowan, Chris, and Faiza Khalid. "Digital Literacy, English Proficiency, and Access to Online Knowledge: A Framework for Public Sector Competency." *Information Technology & People* 33, no. 6 (2020): 1956–1973.
- European Commission. *New European Interoperability Framework: Promoting Seamless Services and Data Flows*. Brussels: Publications Office of the European Union, 2017.
- Fountain, Jane. *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2001.
- Gil-Garcia, J. Ramon, Theresa A. Pardo, and Luis F. Luna-Reyes. "Digital Government and Artificial Intelligence: Toward Public Sector Data Ecosystems." *Government Information Quarterly* 39, no. 4 (2022): 101735.
- Jenkins, Jennifer, Will Baker, and Martin Dewey. *The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca*. 2nd ed. London: Routledge, 2018.
- Janowski, Tomasz. "Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization." *Government Information Quarterly* 32, no. 3 (2015): 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Kankaanranta, Anne, and Leena Louhiala-Salminen. "ELF in the Digital Workplace: Intercultural Communication Revisited." *Journal of English as a Lingua Franca* 8, no. 2 (2019): 275–298.

- Kotilainen, Sirkku, and Janne Matikainen. "Participation, Literacy, and Citizenship: Digital Inclusion and Youth Empowerment in Developing Contexts." *Telematics and Informatics* 54 (2020): 101432.
- Lips, Miriam. *Digital Government: Managing Public Sector Reform in the Digital Era*. London: Routledge, 2020.
- Margretts, Helen. *Information Technology in Government: Britain and America*. London: Routledge, 1999.
- Mauranen, Anna. "Emergent Multilingualism in ELF and Digital Communication." *World Englishes* 39, no. 2 (2020): 263–277.
- McEnery, Tony, and Andrew Hardie. *Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Mergel, Ines. *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Mergel, Ines. *Digital Transformation in the Public Sector: Governance, Innovation, and Public Value Creation*. Cham: Springer, 2019.
- Mergel, Ines. *Digital Transformation of the Public Sector: Cases from the Digital Government Research Center*. Cham: Springer, 2019.
- Mergel, Ines. *Public Management in the Digital Era: Digital Transformation and Value Co-Creation*. London: Routledge, 2021.
- Ng, Wan. "Integrating Digital Literacy and Language Competence in the Workplace." *Education and Information Technologies* 24, no. 2 (2019): 1893–1909.
- OECD. *Digital Government Index 2020: Shaping Digital Transformation in the Public Sector*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- OECD. *Digital Government Review: Building a Digital-Ready Civil Service*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- OECD. *Digital Government Review of Latin America: Building Inclusive and Trustworthy Public Services*. Paris: OECD Publishing, 2022.
- Pang, Min-Seok. "IT Capabilities and E-Government Efficiency: Evidence from Cross-Country Data." *Information Systems Research* 31, no. 1 (2020): 56–74.
- Pollitt, Christopher, and Geert Bouckaert. *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.

- Reddy, P. G. "Digital Literacy and Public Service Delivery in the Digital Era." *Government Information Quarterly* 38, no. 4 (2021): 101–123.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101646>
- Seidlhofer, Barbara. "English as a Lingua Franca." *ELT Journal* 59, no. 4 (2005): 339–341.
- Seidlhofer, Barbara. "English as a Lingua Franca: Changing Attitudes to English." In *The Handbook of English Linguistics*, edited by Bas Aarts and April McMahon, 2nd ed., 621–637. Oxford: Wiley-Blackwell, 2021.
- Shannon, Vallor. *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- United Nations. *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs, 2022.
- Van Laar, Ester, Alexander J. A. M. van Deursen, and Jan A. G. M. van Dijk. "Measuring the Levels of 21st-Century Digital Skills among Professionals Working within the EU." *Computers in Human Behavior* 72 (2017): 377–388.
- Warschauer, Mark, and Rebecca Black. "Digital Language Divides: Access and Inequality in Global Communication." *Language Learning & Technology* 24, no. 2 (2020): 6–23.
- Yeung, Karen, Andrew Howes, and Ganna Pogrebna. "State Responsibility for Algorithmic Bias: The Case of Government Procurement of AI Systems." *Computer Law & Security Review* 40 (2021): 105522.
- Yoon, Sook Kyung, and Taeho Park. "Bridging Digital and Linguistic Divides: The Role of English-Mediated Communication in E-Government." *Telecommunications Policy* 46, no. 7 (2022): 102346.